

## Studi Kaderisasi Terhadap Partai Amanat Nasional (PAN): Problematika Calon Legislatif Artis

Muhammad Irfan Dhiaulhaq AR<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The participation of political parties in elections often creates its own container. Political parties function as a place where public interests congregate, articulate them into policies and build structures for individuals to participate in politics. This makes the essence of the election beats up. As Indonesia prepares for the 2024 elections, political parties are competing to create an effective regeneration system to produce quality candidates and improve the party's image. However, the focus on nominating high-profile and popular candidates, including celebrities, has marginalized many party members, hindering their chances of becoming future leaders. This paper aims to explore the challenges faced in developing party elite cadres in the National Mandate Party (PAN) and propose comprehensive solutions to strengthen cadres and regain public trust in the party. The research methodology used is normative legal research, using a descriptive analytic approach to analyze problems and propose solutions based on primary and secondary legal sources. The findings and discussion highlight the need for an effective recruitment mechanism, strengthen the party's education programs, and promote the importance of selecting candidates on the basis of quality and competence rather than popularity. By overcoming these problems, PAN can strengthen its cadres and rebuild public trust, contributing to a stronger party with competent leaders who represent the aspirations of the people.*

**Keywords:** *Cadre, Political Parties, Government, Legislative Candidate, Artist*

### **Abstrak**

Partisipasi partai politik dalam pemilu seringkali menciptakan wadah tersendiri. Partai politik berfungsi sebagai tempat berkumpulnya kepentingan publik, mengartikulasikannya ke dalam kebijakan dan membangun struktur bagi individu untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini membuat esensi pemilu memanas. Seiring dengan persiapan Indonesia menghadapi pemilu 2024, partai-partai politik berlomba-lomba menciptakan sistem kaderisasi yang efektif untuk melahirkan calon-calon berkualitas dan meningkatkan citra partai. Namun, fokus untuk mencalonkan kandidat terkenal dan populer, termasuk selebritas, telah meminggirkan banyak anggota partai, menghambat peluang mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Tulisan ini bertujuan untuk menggali tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan kader elit partai di Partai Amanat Nasional (PAN) dan mengusulkan solusi komprehensif untuk memperkuat kader dan mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap partai tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik untuk menganalisis masalah dan mengusulkan solusi berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder. Temuan dan diskusi menyoroiti perlunya mekanisme rekrutmen yang efektif, memperkuat program pendidikan partai, dan mempromosikan pentingnya memilih kandidat berdasarkan kualitas dan kompetensi daripada popularitas. Dengan mengatasi persoalan-persoalan tersebut, PAN dapat memperkuat kadernya dan membangun kembali kepercayaan publik, berkontribusi pada partai yang lebih kuat dengan pemimpin-pemimpin kompeten yang mewakili aspirasi rakyat.

**Kata kunci:** *Kader, Partai Politik, Pemerintah, Calon Legislatif, Artis.*

## Pendahuluan

Partisipasi Partai Politik didalam Pemilihan Umum (Pemilu) seringkali menciptakan sebuah wadah tersendiri. Partai politik menjadi wadah berkumpulnya kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam kebijakan dan membangun struktur untuk individu-individu berpartisipasi dalam politik<sup>2</sup>. Akibatnya, wadah politik yang tercipta membuat esensi dari Pemilu terkesan memanas. Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai

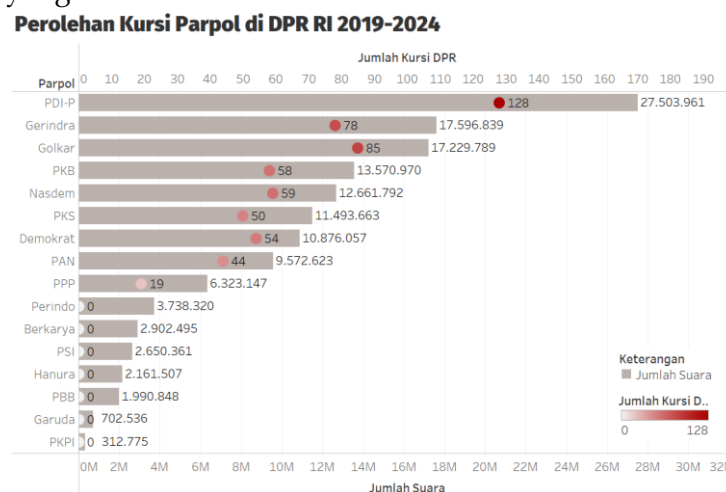
---

<sup>1</sup> Muhammad Irfan Dhiaulhaq AR, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: 21410678@students.uui.ac.id

<sup>2</sup> Farahdiba R.B, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai representasi", *Jurnal Politik Profetik*, Edisi Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 3

pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara<sup>3</sup>. Paruh tahun ini, persiapan pemilu 2024 menjadi ajang pesta demokrasi partai politik dari berbagai aspek masyarakat. Dalam menyongsong semangat Pemilu 2024, para Partai politik berlomba-lomba untuk menciptakan sistematika kaderisasi yang efektif guna menciptakan caleg yang berkualitas serta meningkatkan citra partai agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, partai politik dituntut untuk memiliki mekanisme kaderisasi yang baik. Kaderisasi merupakan bentuk upaya-upaya mendukung terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin dimasa depan.<sup>4</sup>

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang memiliki prinsip kekaderan yang kuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PAN Bab V ayat 1. Prinsip pengkaderan ini menjadi fokus utama partai dalam upaya menciptakan kader-kader yang sesuai dengan idealisme mereka. Untuk pengembangan mendukung kader, PAN juga telah menyediakan partai sekolah bagi calon kader yang akan hadir sebagai solusi efektif. Disamping itu, PAN termasuk kedalam partai politik yang mendapatkan persentase ambang batas/parlemetary threshold yang cukup rendah dibandingkan partai yang lain. Hal ini membuat mereka menduduki peringkat ke 8 dari 9 partai yang dapat mengakuisisi kursi legislative yang ada.



Sumber : (www.kompas.com/laksono hari w)

Oleh karena itu, PAN berinisiatif untuk mendapatkan suara masyarakat dari kalangan artis semapan mungkin agar bisa meningkatkan ambang batas yang mereka dapat kedepannya. Tercatat, PAN berada di peringkat ke-1 dengan calon legislative artis terbanyak yaitu berjumlah 17 orang disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP dengan total 14 orang.

<sup>3</sup> Primandha Sukma N.W, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi Vol. 10 No. 1, Juni 2018, hlm. 58.

<sup>4</sup> Miman Nurdiman, “Analisis Proses Kaderisasi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut”, *Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora*, Edisi Vol.2 No.2, 2019, hlm. 1

Ini Partai Pengusung Caleg Artis Terbanyak di Pemilu 2024

No	Nama	Nilai / orang
1	PAN	17
2	PDIP	14
3	Perindo	11
4	Gerindra	10

Sumber : ([www.databooks.com/adi ahdiyot](http://www.databooks.com/adi%20ahdiyot))

Fenomena ini mengakibatkan banyak kader PAN terpinggirkan dan tidak mendapatkan kesempatan yang seharusnya menjadi hak mereka. Para kader PAN yang seharusnya menjadi cikal calon pemimpin dalam pemilihan umum malah terpojokkan dan tidak mendapatkan pengakuan yang sepatutnya. Problematika yang dihadapi dalam pengembangan personalitas kader yang elit di Partai Amanat Nasional (PAN) berdampak pada esensi kekaderan dalam partai tersebut. Meskipun banyak kader PAN yang telah menempuh pendidikan tinggi dan menerima pendidikan yang sesuai dengan ideologi partai, namun posisi mereka tidak terlihat oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dominasi calon artis legislatif yang mendapatkan perhatian lebih dari partai, dengan tujuan untuk mendapatkan popularitas dan meningkatkan suara partai.

Akibatnya, kader-kader PAN yang seharusnya menjadi wajah partai dan mewakili idealisme partai terpinggirkan oleh kehadiran calon artis legislator yang lebih menarik perhatian publik. Dampak yang timbul dari situasi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana partai dapat menghadirkan kembali identitas kader yang sejati sebagai tulang punggung dan pengemban idealisme partai politik. Partai PAN perlu menemukan solusi yang dapat mengatasi masalah ini agar masyarakat dapat memilih berdasarkan kualitas kader yang telah tumbuh dari dalam idealisme partai politik yang ada. Langkah-langkah perbaikan dan pemulihan identitas kader menjadi penting untuk memperbaiki citra partai dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PAN.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pihak PAN perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif. Pertama, partai dapat memperkuat mekanisme seleksi dan penilaian terhadap calon kader. Kriteria pemilihan calon kader harus berdasarkan pada dedikasi terhadap ideologi partai, komitmen terhadap kepentingan masyarakat, dan integritas pribadi. Selain itu, partai juga perlu meningkatkan pelatihan dan pendidikan politik bagi kader-kader yang telah dipilih agar mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang ideologi partai dan kemampuan yang memadai untuk mewakili aspirasi rakyat. Selain itu, partai PAN dapat memperkuat partai sekolah sebagai sarana pembentukan dan pengembangan kader yang berkualitas. Partai sekolah dapat menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang komprehensif, meliputi aspek kepemimpinan, pemahaman ideologi, partai manajemen, dan keterampilan politik lainnya. Dengan adanya partai sekolah yang efektif, partai PAN dapat menghasilkan

kader-kader yang memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan visi dan misi partai.

Tantangan yang dihadapi dalam menghadirkan kembali identitas kader yang sejati termasuk adanya resistensi dan kecenderungan untuk memilih calon yang populer di masyarakat. Oleh karena itu, partai PAN perlu melakukan kampanye internal yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih kader berdasarkan kualitas dan kompetensi yang dimiliki, bukan hanya popularitas semata. Dengan mengambil langkah-langkah perbaikan dan pemulihan identitas kader yang sejati, partai PAN dapat memperkuat kekaderan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai. Ini akan membantu membangun partai yang lebih kuat, memiliki kader-kader yang berkualitas, dan mampu mewakili aspirasi rakyat dengan lebih baik.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan beberapa perumusan problematika yang ada dalam konteks kaderisasi Partai Amanat Nasional (PAN). Rumusan tersebut meliputi pemahaman mengenai problematika sistem perbudakan kader partai, pencalonan calon legislatif dari kalangan artis, dan kendala integritas artis dalam partisipasi kaderisasi partai. Rumusan selanjutnya mencakup pemahaman mengenai bagaimana sistematika kaderisasi Partai Amanat Nasional yang efektif dan efisien. Permasalahan ini mencakup idealisasi kaderisasi dari unsur masyarakat, solusi kaderisasi dari sisi seniman, serta implementasi sistem kaderisasi yang demokratisasi di seluruh kalangan. Problematika pertama yang perlu dipahami adalah sistem kehancuran kader partai. Bagaimana proses seleksi dan penilaian kader yang dilakukan oleh PAN? Apakah mekanisme seleksi tersebut telah mampu menghasilkan kader-kader berkualitas dan berintegritas yang sesuai dengan ideologi partai?

Selanjutnya, perlu dipahami bagaimana pencalonan calon legislatif dari kalangan artis berdampak pada kaderisasi partai. Bagaimana peran partai dalam memilih calon dari kalangan artis? Apakah hal ini mempengaruhi integritas dan identitas kader yang sejati? Selain itu, kendala integritas artis dalam partisipasi kaderisasi partai juga perlu diperhatikan. Bagaimana artis-artis yang terlibat dalam kaderisasi partai mampu memenuhi tuntutan integritas sebagai seorang kader? Apakah terdapat hambatan atau tantangan dalam membangun kesadaran politik dan komitmen ideologi pada artis yang terlibat?

Rumusan selanjutnya mencakup bagaimana sistematika kaderisasi Partai Amanat Nasional dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Bagaimana mengidealisasikan kaderisasi yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat? Bagaimana mencari solusi penakaderan yang tepat bagi artis yang terlibat? Dan bagaimana mengimplementasikan sistem kaderisasi yang demokratis agar mampu menjangkau seluruh kalangan dengan adil dan merata? Dalam penelitian ini, akan dikaji dan dianalisis secara mendalam problematika kaderisasi di Partai Amanat Nasional. Hal ini mencakup pemahaman terhadap sistem perbudakan kader, mewujudkan pencalonan calon legislatif dari kalangan seniman, serta kendala integritas seniman dalam partisipasi kaderisasi partai. Selain itu, penelitian ini juga akan mencakup eksplorasi terhadap langkah-langkah

solutif dalam menjadikan sistem kaderisasi PAN yang lebih efektif dan efisien, serta implementasi sistem kaderisasi yang demokrasi untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di dalam partai.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan menganalisis secara logis tentang topik yang dibahas dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan keputusan lembaga-lembaga hukum yang menjadi acuan utama dalam penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur hukum lainnya yang memberikan analisis, interpretasi, dan penjelasan terkait topik yang sedang diteliti.

Dalam metode penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data hukum yang relevan dari sumber data sekunder. Data tersebut akan disusun secara sistematis dan objektif untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik penelitian. Pendekatan deskriptif analitik akan digunakan untuk memberikan penjelasan dan menemukan yang mendalam terhadap data hukum yang dikumpulkan, serta mengidentifikasi hubungan logis antara unsur-unsur yang terdapat dalam bahan hukum tersebut. Dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitik dalam penelitian hukum normatif ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan pemahaman hukum yang relevan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Sistematika Rekrutmen Kaderisasi

Kaderisasi merupakan tahapan untuk menyeleksi anggota dalam kegiatan regenerasi sebuah organisasi, baik lembaga pemeritnah maupun partai politik. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam istilah politik yang menjelaskan: “proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai”.<sup>5</sup> Kader yang berkualitas tidak hanya beridentias nasional serta memenuhi kepentingan partai politik saja. Pemimpin yang lahir dari kader tersebut dibentuk dalam pendidikan terkhusus sehingga menciptakan sebuah karakter pemimpin. Hal tersebut merupakan tugas partai politik sebagai pencetak kader pemimpin bangsa.<sup>6</sup> Jenjang persiapan melalui sistematika pendidikan tersebut merupakan tugas pokok yang harus di laksanakan oleh partai politik guna menciptakan kader yang berkualitas dan sarah dengan ideologi mereka.

---

<sup>5</sup> Asty Noor Baalwy, “Rekrutmen Politik Partai Nasional Demokrat dalam Proses Institunialisasi Partai di Kota Makassar, *Skripsi Jurusan Ilmu Politik*, 2012.

<sup>6</sup> Firmasyah, “Mengelola Partai Politik”, *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Edisi I, Jakarta, 2011 hlm. 71.

Didalam realita yang terjadi, banyak fenomena kekosongan ideologi atas kader-kader partai politik dalam badan legislatif negara yang disebabkan proses pengkaderan yang tidak jelas dan hanya bergantung kepada popularitas dan biaya untuk mencanangkan sebuah kader partai dalam politik negeri ini. Perlunya implementasi sistem perekrutan yang sehat dan transparan dalam seluruh tubuh partai politik menjadi tugas besar seluruh partai politik. Kader yang diciptakan nanti harus mulai dibiasakan dengan sistem yang terbebas dari kolusi dan nepotisme. Selain itu, sumber rekrutmen kaderisasi haruslah bersumber dari calon-calon masyarakat yang dipilih atau bersedia secara sukarela menjadi kader partai kedepannya.

Ada dua macam rekrutmen politik, yaitu dengan metode terbuka dan tertutup. Dalam model terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat dan klasifikasi yang telah ditentukan mempunyai kesempatan untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Metode ini mengandung visi dan ideologi masyarakat sebagai platform politik serta nilai moral yang melekat didalam individu masing-masing. Dalam metode ini kompetisi individual cukup tinggi sehingga orang yang benar dan terklasifikasi secara detail yang akan dipilih sebagai kader nantinya. Sebaliknya, metode tertutup dilakukan oleh partai politik terhadap sekelompok masyarakat kecil dengan integritas dan tokoh masyarakat itu sendiri serta sangat jarang dilakukan.<sup>7</sup>

Secara sederhana terdapat 4 sistem yang umumnya menjadi model dari partai politik untuk melakukan proses rekrutmen politik, yaitu:<sup>8</sup>

a. Partisanship

Proses seleksi yang beresensi perekrutan individu dengan loyalitas kepada partai seutuhnya. Oleh karena itu, perbedaan identitas (program maupun kebijakan) dari partai ini terhadap partai lainya memnjadi sangat penting bagi para pendukungnya.

b. Survival

Rekrutmen didasarkan dan diarahkan terhadap orang yang memiliki sumber financial dan massa. Ini biasanya dilakukan oleh partai-partai pada saat menghadapi momen Pemilu. Termasuk rekrutmen terhadap artis dan kalanganya.

c. Meritokratik

Rekrutmen didasarkan dan diarahkan pada orang yang memiliki keahlian dan kapasitas tertentu. Kompetensi dan kapabilitas menjadi poin penting dalam pola ini.

d. Kompartemensalisme

Pola tersebut dilaksanakan atas kebutuhan penguatan departemen yang dianggap strategis dalam organisasi. Sisi-sisi kompetensi juga mendapat perhatian dalam pola seleksi ini.

---

<sup>7</sup> Subiyanto Ibnu, "Pemimpin Berkah Rakyat Membangun Parpol Berbasis Kader", *Galang Pustaka*, Yogyakarta, 2014 hlm 151.

<sup>8</sup> Cornelis Lay, "Organisasi dan Manajemen Kepartaian" *Program Magister Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM*, Yogyakarta. 2016, hlm. 18.

Didalam sistem kaderisasi, terdapat salah satu tahap yang dinamakan sekolah partai. Sekolah partai dapat didefinisikan sebagai penyeleggaraan pendidikan dalam partai politik untuk penguatan kapastistas partai serta pengembangan instrument politik secara organis dan berjenjang untuk mengarah pada suatu pola rekruten dan penguatan internalisasi kader politik yang dirancang secara selaras dan bersinergi yaitu ideologi partai.<sup>9</sup>Nantinya sekolah partai yang dibentuk menjadi wadah bagi tiap partai untuk membentuk ideologi para kader partai yang akan menjabat sebagai perangkat legislatif negara nantinya. Kegiatan tersebut akan mengashilkan inovasi yang bersifat demokratis bagi partai politik yang dapat menumbuhkan kerja partai serta meningkatkan kapasitas pengkaderan yang ada. Kegiatan tersebut juga menentukan arah politik kedepanya, menciptakan instrument kelembagaan demokratis dan tata kelola partai yang bijaksana.

Dalam rangka mencapai integritas birokrasi sistem partai politik serta administrasi kebijakan publik tersebut, partai politik sebagai institusi politik mengadakan sekolah partai sebagai bentuk implementasi birokrasi tersebut. Tujuan ini juga termasuk mengembangkan personalitas kader yang elit dan dapat dipromosikan dengan keyakinan masyarakat melalui pendidikan yang telah dibentuk tersebut. Selain tujuan tersebut, partai politik juga berusaha untuk memberikan rekomendasi terbaik kepada masyarakat dalam memilih calon pemimpin dan menjalin kerjasama atau koalisi antara partai politik.<sup>10</sup>

Dalam pengembangan personalitas kader yang elit, terdapat tantangan yang dihadapi terkait adanya personalitas yang sudah dikenal di kalangan artis. Identitas mereka telah terbentuk sebelumnya tanpa campur tangan ideologi dari partai politik, sehingga tidak mencerminkan unsur demokrasi dan ideologi yang diusung oleh partai politik tersebut. Selain itu, tahap promosi mereka telah berlangsung sebelumnya, di mana mereka telah memiliki popularitas yang cukup besar di kalangan masyarakat. Karena alasan ini, partai politik cenderung tidak melaksanakan kampanye promosi yang gencar, dan seringkali kurang berusaha untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap kader-kader yang mereka tunjuk. Situasi ini menimbulkan tantangan dalam mencapai kepemimpinan yang demokrasi dan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Rekrutmen kader dari kalangan artis yang hanya mengandalkan popularitas mereka di masyarakat memerlukan evaluasi yang lebih mendalam. Dalam hal ini, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti komitmen ideologis dan pemahaman yang kuat tentang kepentingan masyarakat. Partai politik harus memastikan bahwa proses pengembangan personalitas kader dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi dan ideologi partai yang diusung.

Pentingnya kampanye promosi yang efektif juga tidak boleh diabaikan. Partai politik perlu berupaya secara aktif membangun kepercayaan masyarakat terhadap kader-kader yang mereka pilih. Melalui kampanye yang tepat, partai politik dapat

---

<sup>9</sup> Sharil H, "Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan dalam Sekolah Partai bagi Calon Kepala Daerah 2020", *JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji)*, Vol.4 No.1, Tanjung Pinang, 2022, hal 828-829

<sup>10</sup> Ibid, hal 830

menyampaikan visi, misi, dan program kerja kader-kader mereka kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan menilai potensi kepemimpinan kader yang akan mereka pilih. Dalam upaya mencapai kepemimpinan yang digambarkan dan mewakili aspirasi rakyat, partai politik harus memperhatikan tantangan yang ada dan melakukan langkah-langkah yang tepat. Evaluasi yang komprehensif terhadap proses pengembangan personalitas kader dan strategi promosi kampanye yang efektif dapat membantu menciptakan kepemimpinan yang lebih berkualitas dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk menghadapi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih aktif dari partai politik untuk melibatkan kader-kader yang memiliki kompetensi dan visi yang sesuai dengan kepentingan publik. Partai politik harus lebih berperan dalam membentuk kepribadian dan identitas kader, dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan ideologi partai. Selain itu, partai politik juga perlu melakukan kampanye promosi yang lebih intensif dan memberikan upaya nyata untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kader-kader yang mereka pilih sebagai calon pemimpin. Dengan demikian, partai politik dapat mencapai integrasi birokrasi politik dan kebijakan publik yang lebih efektif dan demokrasi.

#### **Kaderisasi Partai Amanat Nasional (PAN)**

Partai PAN memiliki proses pengkaderan yang dilakukan oleh setiap Dewan Pimpinan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam AD/ART partai PAN, yaitu pasal 19 ayat 1. Sistem rekrutmen kader dari partai PAN mengikuti proses yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dimulai dari penerimaan anggota yang bersifat terbuka. Namun, kebijakan penerimaan anggota ini bersifat subjektif dan sepihak, sehingga Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan dari anggota tanpa adanya klasifikasi baku yang spesifik. Masalah yang muncul adalah ketidakmerataan dalam putusan kader dan kekurangan aspek kemasyarakatan yang diperhatikan. Hal ini menjadi tantangan awal dalam proses kehancuran kader di partai PAN. Setelah seseorang disetujui menjadi anggota partai, mereka akan memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai bukti penarikan mereka di partai PAN.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, partai PAN perlu memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan aspek-aspek kemasyarakatan dalam proses pengkaderan. Diperlukan klasifikasi yang lebih jelas dan objektif dalam penerimaan anggota serta peran aktif dari seluruh Dewan Pimpinan dalam memastikan keragaman dan keadilan dalam pengembangan kader. Selain itu, partai PAN juga harus memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kader yang terlibat dalam kegiatan partai, sehingga tercipta sistem pengkaderan yang lebih merata dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN), bahwasanya sistem pengkaderisasian dimulai ketika proses perekrutan anggota partai. Penerimaan anggota PAN sebagaimana yang tercantum didalam ART pasal 3 adalah terbuka bagi seluruh warga negara kesatuan republik indonesia yang telah memenuhi persyaratannya yang meliputi:



- a. telah berumur 17 tahun
- b. memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya
- c. tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain<sup>11</sup>

Persyaratan tersebut dapat memastikan matangnya seorang anggota partai untuk siap menjalankan pendidikan sebagai kader partai politik. Namun, klasifikasi tersebut dapat disampingkan atas kepentingan politik yang ada. Hal ini yang membuat sistem demokrasi partai melemah serta tidak terciptanya ideologi partai yang menyeluruh.

Perumusan sepihak tersebut mengakibatkan banyaknya sumber kader yang berasal dari kalangan artis karena menurut Dewan Pimpinan, mereka dapat mendongkrak suara partai dengan pesat. Seyogyanya, intelektualitas perlu diatas ambang integritas dan popularitas. Jikalau pihak artis hendak mencalonkan diri, maka seharusnya mengikuti proses kualifikasi yang ada. Menurut Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, ia berhadap kehadiran artis ini mendongkrak perolehan suara PAN sebab menurutnya popularitas dari para selebritas ini bisa berubah menjadi elektabilitas dengan tetap memperjuangkan hak masyarakat yang mereka wakili.<sup>12</sup> Asumsi tersebut menggiring sebuah opini bahwa para artis sudah banyak dikenal masyarakat sehingga mudah mendapatkan suara. Sementara pertimbangan kualitas dan kompetensi para artis dinomor sekiankan. Kompleksisasi calon legistalif yang ada menjadi tertinggal dengan popularitas demi memperoleh suara yang banyak dari masyarakat sehingga memudahkan proses kumpai dari aprtai politik itu sendiri. Langkah tersebut sangat mengesampingkan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan kader partai yang baik. Namun yang menjadi problematika adalah bagaimana peran ideologi artis ini nantinya jika telah terpilih.

Sebagai Partai Polittk yang melakukan kaderisasi dari kalangan artis, Partai Amanat nasional telah merekrut artis yang cukup banyak. Bakal caleg tersebut menempati urutan ke-2 dengan partai rekruisasi artis terbanyak. Perekrutan tersebut meliputi artis papan atas seperti Uya Kuya, Eko Patrio, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu dan masih banyak lagi artis yang menjadi calon legislatif dari partai amanat nasional ini.<sup>13</sup> Sumber Perekrutan yang fantastis tersebut menurut mereka dapat mendongkrak suara partai yang ada, karena popularitas yang dibawa sangatlah cukup. Tetapi, kualitas yang disandingkan dengan idealisme partai belum terpandang dengan baik, sehingga terpojokkan disamping popularitas yang ada.

### **Idealisme Partai dan Demokrasi**

Sumber kader yang ideal seharusnya dicanangkan berdaarkan sistematika yang komprehensif, bukan berasal dari opini partai sepihak untuk demokrasi sepihak, terdapat beberapa poin dalam menentukan kualifikasi kader yang baik, diantaranya adalah sebagai berikut.

---

<sup>11</sup> Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional (PAN)

<sup>12</sup> Mohammad Arief, "PAN Masih Andalkan Kalangan Artis Jadi caleg, Klaim Bukan Sekedar Pamer Popularitas", *Portal Pemilu*, 12 Mei 2023, hlm. 2

<sup>13</sup> Ahmad Naufal, "Inilah Daftar Artis Bakal Caleg Pemilu 2024. Dari Melly Goeslaw, Uya Kuya, Narji", *Kontan.co.id*, 15 Mei 2023, hlm. 1.

### **Kualitas Calon Kader dari Artis**

Hal ini menjadi poin yang sangat krusial mengingat tugas utama partai politik adalah melahirkan pemimpin yang solutif dan demokratis bagi masyarakat. Keterlibatan artis dalam ranah legislatif bisa memberikan dampak yang baik jika kemunculan mereka disertai dengan ideologi yang tertanam berdasarkan demokrasi partai.<sup>14</sup> Namun, dampaknya bisa menjadi lebih buruk jikalau para partai politik hanya mengandalkan popularitas semata. Karena mayoritas dari kalangan calon legislatif artis tidak mampu mengutarakan gagasan dan ideologi partai mereka yang seharusnya menjadi kunci dasar setiap kader. Jikalau hal tersebut dibiarkan saja, maka ruang legislatif yang tercipta tidak lagi berisi ideologi negara, namun hanya popularitas suara rakyat semata.

### **Esensi Proses Rekrutmen**

Konstitusi Republik Indonesia telah menjamin hak untuk berpolitik bagi seluruh warganya.<sup>15</sup> Sehingga tidak bisa dinyatakan bersalah terkait keputusan dalam proses rekrutmen artis tersebut, selama calon tersebut memenuhi kualifikasi yang ada secara administratif. Namun, pendapat penulis berdasarkan kasus yang terjadi menilai bahwasanya partai manat nasional melakukan proses rekrutmen tersebut hanya untuk memperoleh popularitas dan suara masyarakat tanpa memandang aspek administratif yang ada. Perihal tersebut tidak semestinya terjadi dan malah melahirkan pemimpin yang cacat demokratis serta bergantung terhadap popularitas yang ada untuk membawa partai politik melewati ambang batas partai yang ada.

### **Identitas Ideologis dan Demokratis**

Tujuan dari perekrutan kader partai yang sesuai secara administratif adalah membawa idealisme partai untuk menjadi tiang pergerakan demokrasi indonesia kedepannya. Keputusan partai politik untuk merekrut calon legislatif dari kalangan artis menuai komentar dari masyarakat. Mereka dinilai hanya memanfaatkan popularitas. Jika demokrasi hanya mempertaruhkan popularitas, maka proses demokrasi yang terjadi akan kehilangan identitasnya sebagai penyaluran aspirasi ideologi indonesia kedepannya.

Selain poin-poin tersebut, masih banyak lagi aspek yang perlu diperhatikan untuk merekrut calon legislatif dari masyarakat, khususnya dari kalangan artis yang hanya mengandalkan popularitas mereka dikalangan masyarakat.

### **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, Penulis menyimpulkan bahwa dalam persiapan menjelang pemilu 2024, partai-partai politik berlomba-lomba untuk mempersiapkan kader terbaik dan memenangkan suara sebanyak mungkin. Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi sorotan karena memperoleh suara terkecil pada pemilu

---

<sup>14</sup> Aseng Yulanda, "Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi", *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol.07 No.01, Universitas Negei Padang, 15 Juni 2023

<sup>15</sup> Aseng Yulanda, Op.cit, hal.152

sebelumnya dan berinisiatif merekrut calon legislatif dari kalangan artis untuk meningkatkan popularitas dan pengaturan ambang batas mereka. Namun, Memenangkan artis sebagai calon legislatif menimbulkan kontroversi dan masalah yang kompleks. Keputusan ini menciptakan pertentangan di antara masyarakat dan bahkan di dalam partai itu sendiri.

Proses kaderisasi, yang seharusnya mengutamakan kualitas dan kapabilitas kader, menjadi terpinggirkan oleh popularitas. Akibatnya, kualitas kader yang terdidik dan berpengalaman tidak mendapat perhatian yang layak. Kurangnya pembekalan ideologi partai kepada kader artis mengakibatkan "cacat ideologis". Artis-artis tersebut mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai ideologi partai, yang dapat merusak sistem demokrasi partai. Oleh karena itu dalam idealisasi kaderisasi, penting untuk mempertimbangkan kualitas calon kader dan memastikan mereka mengikuti tahapan seleksi dan pendidikan partai sekolah. Ini membantu menjembatani partai dengan ideologi yang sama dengan kader lainnya.

Dilain hal, Ikhtiar artis dalam menjadi kader partai harus didukung oleh pengetahuan politik yang cukup, bukan hanya berdasarkan popularitas semata. Artis-artis yang ingin terlibat dalam politik harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik dan ideologi partai. Identitas ideologis dan prinsip demokrasi partai yang harus menjadi pertimbangan utama dalam mengukur kesuksesan kader. Partai perlu memastikan bahwa kader-kader, termasuk seniman-seniman, memahami dan berkomitmen pada ideologi partai serta menghormati proses demokrasi partai.

Dengan mengambil langkah-langkah perbaikan dan pemulihan identitas kader yang sejati, partai PAN dapat memperkuat kekaderan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai. Ini akan membantu membangun partai yang lebih kuat, memiliki kader-kader yang berkualitas, dan mampu mewakili aspirasi rakyat dengan lebih baik.

## Daftar Pustaka

- R.B, Faradiba, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai representasi", Vol. 3, 2014
- N.W, Primanda S, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10, 2018
- Nurdiman, M, "Analisis Proses Kaderisasi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2019
- Noor Baalwy, Asty, "Rekrutmen Politik Partai Nasional Demokrat dalam Proses Institusionalisasi Partai di Kota Makassar", *Skripsi Jurusan Ilmu Politik*, 2012
- Firmansyah, "Mengelola Partai Politik", *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Vol. 1, 2011
- Ibnu, Subiyanto, "Pemimpin Berkah Rakyat Membangun Parpol Berbasis Kader", *Galang Pustaka*, 2014
- Lay, C, "Organisasi dan Manajemen Kepartaian", *Magister Politik UGM*, 2016
- Sharil H, "Institusionalisasi Pendidikan Politik PDI Perjuangan dalam Sekolah Partai bagi Calon Kepala Daerah", *JISIPOL (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji)*, Vol. 4 No. 1, 2022

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01.Tahun 2015. Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.

"Inilah Daftar Artis Bakal Caleg Pemilu 2024, Dari Melly Goeslaw, Uya Kuya, Narji", <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-daftar-artis-bakal-caleg-pemilu-2024-dari-melly-goeslaw-uya-kuya-narji>, diakses tanggal 15 Mei 2023

"Pan Masih Andalkan Kalangan Artis jadi Caleg, Klaim Bukan Sekedar Pamer Populartias", <https://www.viva.co.id/berita/politik/1599731-pan-daftar-caleg-2024-deretan-artis-siap-birukan-kpu-ri>, diakses tanggal 12 Mei 2023

Aseng Y, "Fenomena Rekrutmen Artis Sebagai Calon Legislatif Ditinjau dari Perspektif Aksiologi", *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 7 No. 1, 2023